

Dinamika konflik Papua dan kesenjangan pembangunan antar wilayah: Analisis geopolitik dan geostrategi dalam kerangka ketahanan

Tasya Auliya

Program Studi Perbankan Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
e-mail: tasyaauliyo701@gmail.com

Kata Kunci:

Geopolitik, geostrategi, ketahanan, konflik, pembangunan

Keywords:

Geopolitics, geosrategy, resilience, conflict, development

ABSTRAK

Konflik di Papua merupakan fenomena multidimensional yang dipengaruhi oleh faktor sejarah, sosial, ekonomi, politik, termasuk keberadaan kelompok separatis serta ketimpangan pembangunan yang cenderung bersifat Java-centric. Kondisi geografis Indonesia yang kompleks, terutama wilayah terpencil dan sulit dijangkau, sering dimanfaatkan untuk melemahkan kontrol negara. Di sisi lain, kesenjangan pembangunan antar wilayah menimbulkan ketidakpuasan yang berpotensi berkembang menjadi sebuah konflik. Dalam persepektif geopolitik, Indonesia berlandaskan Wawasan nusantara yang menekankan kesatuan wilayah sebagai satu entitas utuh,

sementara itu, geostartegi diwujudkan melalui kebijakan dan langkah oprasional negara dalam menjaga stabilitas dan integrasi nasional. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang komprehensif melalui keseimbangan antara keamanan dan kesejahteraan guna memperkuat ketahanan nasional serta menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

ABSTRACT

The phenomenon of conflict in Papua and the dynamics of development tend to be Java-centric. The results of the study show that Indonesia's complex geographical conditions characterized by remote and hard-to-reach areas are often used by separatist groups to weaken state control. On the other hand, development inequality between regions has the potential to cause dissatisfaction that can develop into horizontal or vertical conflicts. in perspective and geopolitics and geostrategy within the framework of Indonesia's national resilience system, especially in dealing with geopolitical-based internal conflicts such as separatist movements and development gaps between regions. Conceptually, Indonesia's geopolitics is rooted in the Nusantara Insight which places regional unity as a single political, economic, social, and security defense entity. Meanwhile, geostrategy is realized through state policies and operational steps in maintaining national stability and integration.

Pendahuluan

Konflik bersenjata yang melibatkan kelompok kriminal bersenjata di Papua terus menimbulkan dampak serius terhadap keamanan masyarakat. Berbagai tindakan kekerasan terjadi di sejumlah wilayah, seperti penyerangan terhadap tenaga pendidik di Distrik Omukia yang mengakibatkan guru sekolah dasar dan menengah kehilangan



nyawa, aksi pembakaran helikopter, penganiayaan terhadap warga sipil menggunakan senjata tajam, hingga kontak senjata antara aparat Paskhas dan kelompok bersenjata di kawasan Aminggenu Bandara. Fenomena tersebut menunjukkan bahwa masyarakat sipil masih menjadi pihak yang paling rentan terdampak dalam eskalasi konflik yang berlangsung (Khairunnisa, 2024).

Dalam kurun satu dekade terakhir, data menunjukkan bahwa sebagian besar tindak kekerasan di Papua justru berasal dari relasi antarkelompok masyarakat maupun jaringan keluarga tertentu dengan jumlah kasus yang jauh lebih tinggi dibanding keterlibatan aparat negara. Sementara itu, kontribusi kasus yang melibatkan unsur TNI dan Polri berada pada angka yang relatif lebih kecil. Korban jiwa yang muncul akibat konflik berkepanjangan tersebut mayoritas berasal dari kalangan warga sipil serta aparat keamanan, sedangkan persentase korban dari pihak kelompok bersenjata jauh lebih sedikit. Kondisi ini memperlihatkan bahwa konflik di Papua telah berkembang menjadi persoalan kemanusiaan dan keamanan yang kompleks (Rosmeli, 2015).

Di sisi lain, persoalan ketimpangan pembangunan antar daerah turut memperbesar potensi lahirnya konflik sosial dan politik. Model pembangunan nasional yang selama bertahun-tahun lebih terkonsentrasi di wilayah barat Indonesia menyebabkan munculnya perbedaan tingkat kesejahteraan, infrastruktur, dan akses ekonomi antara kawasan timur dan barat. Ketidakseimbangan tersebut memunculkan rasa keterpinggiran di sejumlah daerah, terutama wilayah perifer, yang kemudian dapat berkembang menjadi ketidakpercayaan terhadap pemerintah pusat. Apabila tidak ditangani secara serius, keadaan ini berisiko memunculkan konflik vertikal bahkan dorongan separatisme (Hendrik & Sonya, 2024).

Sejumlah laporan nasional maupun internasional, termasuk publikasi Badan Pusat Statistik dan kajian World Bank, menunjukkan bahwa pemerataan pembangunan masih menjadi tantangan utama dalam mewujudkan keadilan sosial di Indonesia. Oleh sebab itu, isu separatisme dan ketidakmerataan pembangunan tidak dapat dipandang sebagai persoalan yang berdiri sendiri. Keduanya memiliki keterkaitan erat dalam konteks geopolitik dan ketahanan nasional. Dengan demikian, strategi negara yang menitikberatkan pada pembangunan inklusif, penguatan kesejahteraan masyarakat daerah terpencil, serta peningkatan kehadiran negara secara merata menjadi langkah penting untuk menjaga stabilitas nasional dan mempertahankan integritas Negara Kesatuan Republik Indonesia (Nusa & Pigay, 1962).

Dalam perspektif geopolitik dan geostrategi, ketahanan nasional merupakan kondisi dinamis bangsa dalam menghadapi berbagai ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan yang dapat mengganggu stabilitas negara. Indonesia sebagai negara kepulauan dengan wilayah luas dan beragam membutuhkan strategi pembangunan yang tidak hanya berfokus pada aspek keamanan, tetapi juga pemerataan kesejahteraan masyarakat yang menciptakan stabilitas nasional berkelanjutan. Oleh sebab itu, penyelesaian konflik Papua perlu dilakukan melalui pendekatan yang mengintegrasikan keamanan, pembangunan, dan kesejahteraan sosial sebagai bagian dari usaha memperkuat ketahanan nasional (Nashrulloh, 2025).

Pembahasan

Faktor Konflik Papua dan Ketimpangan Pembangunan

Persoalan yang terjadi di Papua merupakan konflik berkepanjangan yang terbentuk dari berbagai unsur, mulai dari sejarah, kondisi sosial masyarakat, ekonomi, hingga dinamika politik nasional. Salah satu aspek yang sering muncul dalam konflik tersebut ialah keberadaan kelompok bersenjata yang menolak keberadaan Papua sebagai bagian dari Indonesia dan melakukan aksi perlawanan menggunakan kekuatan senjata. Tindakan yang dilakukan kelompok tersebut kerap menimbulkan korban, baik dari unsur aparat maupun warga sipil, sehingga situasi keamanan di Papua menjadi tidak stabil (Agnesica et al., 2022).

Permasalahan ini juga berkaitan dengan perbedaan pandangan mengenai proses penyatuan Papua ke dalam Indonesia yang hingga kini masih dipersoalkan oleh sebagian kelompok masyarakat. Selain itu, munculnya rasa ketidakadilan dalam bidang ekonomi, politik, dan sosial memperbesar rasa kecewa masyarakat terhadap pemerintah. Perbedaan identitas budaya, perubahan sosial akibat arus pendatang, serta ketegangan antarkelompok masyarakat semakin memperumit keadaan. Pendekatan pemerintah yang selama ini lebih menitikberatkan pada aspek keamanan dianggap belum mampu menyentuh akar persoalan sosial dan budaya masyarakat Papua. Akibatnya, konflik terus berulang dan berdampak terhadap terganggunya pembangunan, menurunnya kesejahteraan masyarakat, serta melemahnya stabilitas keamanan di kawasan tersebut (Chasib, 2024).

Jika ditinjau dari perspektif identitas nasional, konflik Papua menunjukkan bahwa proses pembentukan rasa persatuan dan kebangsaan di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan. Identitas nasional pada hakikatnya berfungsi sebagai perekat sosial yang mampu menyatukan keberagaman suku, budaya, bahasa, dan kepentingan dalam kehidupan berbangsa. Ketika nilai persatuan mulai melemah, potensi munculnya konflik sosial maupun tuntutan pemisahan wilayah akan semakin besar. Dalam konteks ini, integrasi nasional dipahami sebagai upaya menyatukan berbagai perbedaan agar tercipta kehidupan masyarakat yang harmonis dan stabil. Ketidakseimbangan dalam proses integrasi dapat memunculkan ancaman disintegrasi berupa konflik sosial maupun gerakan separatisme. (Mulyoto, 2021) menjelaskan bahwa identitas nasional merupakan bagian penting dalam pembentukan karakter bangsa karena berperan memperkuat solidaritas sosial, rasa kebangsaan, dan komitmen masyarakat dalam menjaga keutuhan negara. Oleh karena itu, lemahnya rasa persatuan dapat menjadi faktor yang memicu perpecahan dan mengancam kedaulatan Indonesia (Ramadhani, 2025)

Ketimpangan pembangunan antardaerah juga menjadi faktor yang memperbesar kompleksitas konflik di Papua. Selama bertahun-tahun, pembangunan nasional lebih banyak terpusat di wilayah tertentu, khususnya Pulau Jawa, sehingga menimbulkan kesenjangan dengan kawasan lain yang pertumbuhannya relatif tertinggal. Perbedaan kualitas infrastruktur, akses ekonomi, pendidikan, dan pelayanan publik menyebabkan daerah di kawasan timur Indonesia mengalami hambatan pembangunan yang cukup serius. Selain itu, perpindahan tenaga kerja produktif ke wilayah yang lebih maju

membuat daerah tertinggal semakin kekurangan sumber daya manusia berkualitas. Dampaknya, tingkat kemiskinan tetap tinggi, lapangan pekerjaan terbatas, dan kualitas hidup masyarakat sulit meningkat. Kondisi tersebut memperbesar rasa ketidakpuasan masyarakat daerah terhadap pemerintah pusat dan berpotensi memperpanjang konflik sosial maupun politik di Papua (Akmaliza et al., 2022).

Konflik Papua dan Ketimpangan Pembangunan dalam Perspektif Geopolitik

Dari sudut pandang geopolitik, persoalan Papua bukan hanya menyangkut konflik domestik, tetapi juga berkaitan erat dengan posisi strategis Indonesia di kawasan internasional. Papua terletak di bagian timur Indonesia dan berbatasan langsung dengan negara lain, sehingga wilayah ini memiliki nilai penting dalam aspek pertahanan dan keamanan negara. Selain letaknya yang strategis, Papua juga menyimpan sumber daya alam yang sangat besar dan bernilai ekonomi tinggi. Kekayaan tersebut menjadikan Papua memiliki daya tarik bagi berbagai kepentingan, baik dari dalam maupun luar negeri (Anjani, 2025).

Dalam konteks geopolitik, konflik yang berlangsung di Papua tidak dapat dipisahkan dari perebutan pengaruh ekonomi dan politik global. Ketidakstabilan yang terus berlangsung dapat mengganggu integritas wilayah Indonesia sebagai negara kepulauan. Selain itu, konflik berkepanjangan juga berpotensi menghambat pembangunan di kawasan timur Indonesia serta melemahkan ketahanan nasional. Ketimpangan pembangunan yang terjadi selama ini memperlihatkan adanya ketidakseimbangan hubungan antara pusat dan daerah. Kebijakan pembangunan yang terlalu berorientasi pada Pulau Jawa menyebabkan Papua mengalami keterbatasan akses ekonomi dan infrastruktur meskipun memiliki potensi sumber daya yang besar. Oleh karena itu, penyelesaian konflik Papua memerlukan kebijakan yang tidak hanya menitikberatkan pada keamanan, tetapi juga memperhatikan pemerataan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat agar stabilitas nasional dapat terjaga.

Konflik Papua dan Ketimpangan Pembangunan dalam Perspektif Geostrategi

Dalam perspektif geostrategi, penanganan konflik Papua membutuhkan langkah yang menyeluruh melalui kombinasi pendekatan keamanan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Strategi yang hanya berorientasi pada penggunaan kekuatan keamanan tidak cukup untuk menyelesaikan akar persoalan secara permanen. Pemerintah perlu mendorong pembangunan yang lebih merata dengan memperhatikan kualitas pendidikan, infrastruktur, investasi, dan sumber daya manusia di Papua (Agus & Pengantar, 2025).

Kebijakan seperti otonomi khusus perlu terus dievaluasi agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat lokal. Selain itu, dialog terbuka antara pemerintah dan masyarakat Papua menjadi langkah penting untuk membangun kepercayaan serta mengurangi ketegangan sosial yang selama ini terjadi. Keberhasilan strategi tersebut sangat bergantung pada kerja sama antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, tokoh masyarakat, dan partisipasi aktif warga Papua sendiri dalam pembangunan daerahnya. Dengan strategi yang inklusif dan berkelanjutan, diharapkan konflik dapat dikurangi sekaligus menciptakan pembangunan yang lebih adil sehingga ketahanan nasional dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia tetap terjaga.

Dampak Konflik Papua terhadap Ketahanan Nasional

Konflik di Papua memberikan pengaruh besar terhadap ketahanan nasional Indonesia, baik dari sisi geopolitik maupun geostrategi. Dalam perspektif geopolitik, stabilitas Papua berkaitan langsung dengan upaya mempertahankan kedaulatan negara dan menjaga keutuhan wilayah Indonesia. Isu separatisme serta tuduhan pelanggaran hak asasi manusia sering dimanfaatkan oleh pihak luar untuk memberikan tekanan politik terhadap Indonesia di tingkat internasional. Oleh sebab itu, pemerintah perlu memperkuat diplomasi internasional agar dukungan asing terhadap gerakan separatis dapat diminimalkan sekaligus mempertahankan pengakuan dunia terhadap kedaulatan Indonesia (Santoso et al., 2024).

Selain itu, kawasan timur Indonesia memiliki posisi strategis dalam dinamika politik Asia-Pasifik. Ketidakstabilan di Papua dapat memengaruhi posisi Indonesia dalam hubungan regional maupun internasional. Dari perspektif geostrategi, konflik Papua juga berdampak pada keamanan jalur logistik nasional dan pengelolaan sumber daya alam yang menjadi bagian penting dalam pembangunan ekonomi Indonesia.

Geostrategi nasional menekankan pentingnya keseimbangan antara keamanan dan kesejahteraan masyarakat. Jika ketahanan sosial dan ekonomi masyarakat Papua tidak diperkuat, maka berbagai ancaman nonmilitar seperti kemiskinan, kesenjangan digital, dan keterbelakangan pembangunan akan semakin sulit diatasi. Karena itu, diperlukan peningkatan koordinasi keamanan, penguatan intelijen, pembangunan infrastruktur, serta pemberdayaan masyarakat lokal agar Papua mampu berkembang sebagai wilayah strategis yang mendukung kemajuan ekonomi nasional (Faslah, 2024).

Tantangan dan Penyelesaian Konflik Papua serta Ketimpangan Pembangunan

Konflik Papua memiliki akar persoalan yang sangat kompleks karena melibatkan berbagai aspek sekaligus, mulai dari ekonomi, politik, sosial, hingga sejarah. Salah satu tantangan utama ialah tingginya tingkat kemiskinan dan ketimpangan pembangunan yang masih dirasakan masyarakat Papua. Ketidakmerataan akses pendidikan, kesehatan, dan pelayanan publik memperbesar kesenjangan sosial di wilayah tersebut. Selain itu, persoalan sejarah integrasi Papua ke dalam Indonesia masih menjadi sumber munculnya gerakan separatisme di sebagian kelompok masyarakat (Sumirat, 2019).

Masalah lain yang turut memperumit situasi ialah dugaan pelanggaran hak asasi manusia dan trauma sosial akibat pendekatan keamanan di masa lalu. Masyarakat asli Papua juga sering merasa termarginalkan dalam kegiatan ekonomi maupun pembangunan daerahnya sendiri. Sementara itu, pelaksanaan otonomi khusus dinilai belum sepenuhnya berhasil meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara merata.

Dalam proses penyelesaian konflik, pemerintah menghadapi berbagai hambatan, seperti rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap negara, kondisi geografis yang sulit dijangkau, praktik korupsi, serta rendahnya kualitas sumber daya manusia. Tingginya angka penyakit dan keterbatasan akses pendidikan juga menjadi faktor penghambat pembangunan masyarakat Papua (Afaia et al., 2023).

Oleh karena itu, penyelesaian konflik Papua memerlukan langkah yang menyeluruh dan berorientasi jangka panjang. Pendekatan dialog antara pemerintah dan

masyarakat Papua perlu diperkuat agar tercipta komunikasi yang lebih terbuka dan saling percaya. Pemerintah juga perlu mempercepat pembangunan infrastruktur untuk mengurangi keterisolasian wilayah serta mengevaluasi kebijakan otonomi khusus agar lebih tepat sasaran. Selain itu, perlindungan hak asasi manusia dan peningkatan partisipasi masyarakat asli Papua dalam pembangunan harus menjadi prioritas utama. Dengan pendekatan yang adil, inklusif, dan berkelanjutan, diharapkan stabilitas sosial dapat tercapai serta kesejahteraan masyarakat Papua dapat meningkat secara nyata (Achmad et al., 2024).

Kesimpulan dan Saran

Permasalahan yang berlangsung di Papua merupakan persoalan nasional yang memiliki dimensi sangat luas karena dipengaruhi oleh berbagai unsur yang saling berkaitan, seperti sejarah politik, kondisi sosial masyarakat, ketimpangan ekonomi, hingga dinamika kekuasaan. Konflik yang terus berlangsung tidak hanya dipicu oleh keberadaan kelompok yang menolak integrasi Papua dengan Indonesia, tetapi juga diperkuat oleh ketidakmerataan pembangunan antarwilayah yang menimbulkan rasa ketidakadilan di tengah masyarakat. Situasi tersebut semakin kompleks karena proses penguatan identitas kebangsaan dan integrasi nasional belum berjalan secara optimal, sehingga memunculkan potensi perpecahan serta melemahnya rasa persatuan dalam kehidupan bernegara.

Ditinjau dari sudut geopolitik, Papua mempunyai arti penting bagi Indonesia karena letaknya yang strategis di kawasan timur dan berbatasan langsung dengan negara lain. Selain posisi geografisnya yang bernilai strategis, Papua juga memiliki cadangan sumber daya alam yang besar sehingga menjadi wilayah yang memiliki nilai ekonomi dan politik tinggi. Oleh sebab itu, stabilitas Papua berkaitan erat dengan kepentingan nasional Indonesia dalam mempertahankan kedaulatan negara dan menjaga keutuhan wilayah.

Sementara itu, dalam perspektif geostrategi, penyelesaian konflik Papua tidak dapat hanya mengandalkan pendekatan keamanan semata. Penanganan yang efektif harus dibarengi dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan yang merata, peningkatan kualitas pendidikan dan sumber daya manusia, perluasan infrastruktur, serta kebijakan pembangunan yang lebih inklusif dan berkeadilan. Dengan langkah yang menyeluruh, berkesinambungan, dan melibatkan seluruh elemen masyarakat, upaya penyelesaian konflik di Papua diharapkan mampu menciptakan stabilitas nasional sekaligus memperkuat ketahanan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Daftar Pustaka

- Achmad, A., Rahawarin, A. R., & Hamid, M. A. (2024). Penggunaan Tindak Pidana Terorisme Terhadap Kelompok Separatis Bersenjata Di Papua Perspektif Geopolik Global. *Journal of Law Review*, 4(1), 49–60.
- Afalia, W., Hamda, I., Adriana, S. A., Alamsyah, A. F., & Wafiroh, N. L. (2023). *Determinants Of Human Development Index In Papua Province 2012-2021*. Wiga :

- Jurnal Penelitian Ilmu Ekonomi, 13(2), 246–256. <https://repository.uin-malang.ac.id/17843/>
- Agnesica, R., Sihaloho, H., Hanita, M., Pamungkas, C., & Indonesia, U. (2022). Narasi Dialog Damai Papua-Jakarta Dalam Bingkai Ketahanan Nasional Dan Implementasinya Narratives of Jakarta-Papua Peaceful Dialogue in the Frame of National Resilience and its Implementation. *Jurnal Masyarakat Indonesia*, 48(1), 93–103.
- Agus, R., & Pengantar, K. (2025). Makalah Kewarganegaraan Geostrategi Indonesia.
- Akmaliza, A., Nehe, A. S., Sihotang, A. M., Hakim, B., Purmadana, E., Praswadi, H., Raziq, M., Darmawan, M. R., Suhada, R., & Sabina, S. (2022). *Jurnal Riset Pendidikan dan Pengajaran GEOPOLITIK INDONESIA Program Studi Pancasila*, Fakultas Pertanian,
- Anjani, E. (2025). Identitas Nasional dalam Dinamika Globalisasi dan Tantangan Integrasi Nasional di Indonesia. *Maliki Interdisciplinary Journal (MIJ)*, 3, 806–811.
- Chasib, A. (2024). Resolution of the Long Conflict in Papua for Equitable National Development. *Jurnal Lemhannas RI (JLRI)*, 12(1), 93–100.
- Faslah, R. (2024). Identitas Nasional, geostrategi, dan geopolitik: Membangun keberlanjutan dan kedaulatan. PT. Literasi Nusantara Abadi Grup. <http://repository.uin-malang.ac.id/20872/>
- Hendrik, R., & Sonya, E. R. (2024). Analisis Konflik dan Masalah Sosial di Papua: Upaya Penyelesaian dengan Menelusuri Akar Konflik dan Masalah. *Analisis Konflik Dan Masalah Sosial Di Papua : Upaya Penyelesaian Dengan Menelusuri Akar Konflik Dan Masalah*, 4(1), 32–46.
- Khairunnisa. (2024). Analisis Ketimpangan Pembangunan Wilayah Antar Provinsi (Studi Kasus Pulau Jawa Tahun 2014-2023). *Journal of Development Economic And Social Studies*, 3(3), 898–911.
- Mulyoto, G. P. (Director). (2021). Identitas Nasional dalam Karakter Bangsa [Video recording]. <http://repository.uin-malang.ac.id/10835/>
- Nashrulloh, H. (2025). Penguatan ketahanan nasional melalui identitas dan geostrategi. 3, 1955–1965.
- Nusa, I., & Pigay, N. (1962). Menemukan Akar Masalah dan Solusi Atas Konflik Papua Supenkah.
- Ramadhani, A. (2025). Identitas nasional sebagai karakter bangsa indonesia dalam bermedia sosial: Antara tantangan dan tanggung jawab negara. *Maliki Interdisciplinary Journal (MIJ)*, 3, 108–115.
- Rosmeli. (2015). Dampak investasi dan tenaga kerja terhadap ketimpangan pembangunan kawasan timur indonesia. *Jurnal Paradigma Ekonomika*, 10(2), 362–369.
- Santoso, E., Anggraini, S., Pembangunan, E., & Jember, U. (2024). Cermin : Jurnal Penelitian Disparitas Pembangunan Antar Wilayah di Indonesia : Model Data Panel Development Disparities Between Regions In Indonesia : Cermin : Jurnal Penelitian , 8, 355–367.
- Sumirat, F. (2019). Analisis Inovasi Kebijakan Daerah dalam Rangka Pengurangan Kesenjangan Wilayah Analisis Inovasi Kebijakan Daerah dalam Rangka Pengurangan Kesenjangan Wilayah. *Bappenas Working Papers*, 11(2), 270–293.